
PENILAIAN KINERJA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH

Andriani*, Rizky Kurniawan Pambudi

Institut Agama Islam Negeri Kediri, Kediri

INFO ARTIKEL**Riwayat Artikel:***Received* : May 2nd, 2022*Revised* : May 21st, 2022*Accepted* : June 6th, 2022**Keywords:***Performance, Sharia Financial Services Cooperative, Cooperative Health***Kata Kunci:***Kinerja, Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Kesehatan Koperasi***ABSTRACT**

The focus of this research is how to compare the performance analysis of BMT Lalluir and KSPPS BMW Ar Rahmah, East Java. This type of research is a case study in this study the presence of the researcher as an instrument as well as data collector. Based on this research, it can be concluded that the health analysis of the Sharia Savings and Loans Cooperative (KSPPS) is considered quite healthy. With a score difference of 7.15% with the scores obtained by each institution, BMT Lalluir got a score of 68.80 (Max. 100). And KSPPS BMW Ar Rahmah East Java got a score of 75.95 (Max.100).

ABSTRAK

Fokus penelitian ini adalah bagaimana membandingkan analisis kinerja BMT Lantansir dan KSPPS BMW Ar Rahmah Jawa Timur. Jenis penelitian ini adalah studi kasus dalam penelitian ini kehadiran peneliti sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa analisis kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) dinilai cukup sehat. Dengan selisih skor 7,15% dengan skor yang diperoleh masing-masing institusi, BMT Lantansir mendapat skor 68,80 (Maks. 100). Dan KSPPS BMW Ar Rahmah Jawa Timur mendapat skor 75,95 (Max.100).

*Corresponding author :

Address : Kediri, Indonesia

E-mail : andriani.iainkediri@gmail.com

PENDAHULUAN

Sistem lembaga keuangan di Indonesia dijalankan oleh dua jenis lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Lembaga keuangan bank secara operasional dibina dan diawasi oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia. Sedangkan lembaga keuangan non bank merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya dari lembaga keuangan bank. Pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI (Soemitra, 2009). Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) terdiri dari dua kelompok lembaga, yakni lembaga keuangan berbentuk bank dan lembaga keuangan berbentuk bukan bank. Lembaga keuangan yang berbentuk bank mencakup Bank Umum Syari'ah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS). Sedangkan lembaga keuangan yang bukan berbentuk bank adalah Unit Usaha Syari'ah (UUS) dan Baitul Maal wa al Tamwil (BMT) (Nuryadin, 2004). Lembaga Keuangan Syariah sudah ada sejak jaman terdahulu sejak jaman Rasulullah yang mempunyai istilah "Baitul mal" merupakan lembaga keuangan syariah dalam bentuk non bank (Yaya, 2009).

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa BMT adalah lembaga keuangan mikro non bank yang memiliki kegiatan utama yaitu kegiatan sosial dan kegiatan bisnis sekaligus. Dalam kegiatan sosial BMT memiliki kesamaan fungsi dengan badan/lembaga amil zakat yang melakukan kegiatan menerima dan mengumpulkan zakat, infak, sedekah dan bantuan sosial lainnya untuk didistribusikan kepada yang berhak menerima atau kepada pihak-pihak yang sangat membutuhkan (Supadie, 2013). Saat ini, berdasarkan data dari Galamedia, Perhimpunan BMT Indonesia memiliki anggota sebanyak 322 BMT di sembilan provinsi. Perhimpunan BMT juga memiliki total jumlah anggota sebanyak 4 juta orang dan 1.610 pasar tradisional. Salah satunya adalah BMT Lantahir yang terletak di Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Sebagai sebuah Lembaga keuangan Syariah non bank, BMT Lantahir menjalankan fungsinya sebagai koperasi berbasis Syariah dengan cara menghimpun dana melalui dana masyarakat, simpanan biasa, simpanan berjangka atau deposito, dan kerja sama antara Lembaga atau industri serta menyalurkan dana kepada anggotanya secara langsung melalui beberapa produk jasa yang ditawarkan sesuai dengan akad – akad Syariah dengan prinsip bagi hasil seperti, Al murabahah, Al Musyarakah, Al Muzara'ah dan Al MUSAQAH.

Dalam praktiknya ditemukan beberapa masalah terutama dalam hal penyaluran dana. Keunggulan yang dimiliki berupa produk utama yang ditonjolkan adalah akad pembiayaan akad murabahah yang mencapai 80% total anggota menggunakan akad ini. Akan tetapi salah satu kelemahan dalam program pembiayaan di BMT Lantahir adalah ditiadakannya akad pembiayaan mudharabah. Dikatakan Hal itu disebabkan karena susahnya maintenance atau pengawasan oleh koperasi kepada anggota, sehingga akad tersebut ditiadakan. Sehingga hal tersebut menjadi sebab tidak terpenuhinya aspek kualitas yang menyangkut manfaat yang dirasakan oleh anggota koperasi. Masalah lain yang timbul adalah Dari sisi kas pertumbuhannya cenderung lambat, hal ini tentu disebabkan karena masih tingginya angka pembiayaan bermasalah yang dialami oleh BMT Lantahir sehingga jumlah pendapatan yang dihimpun cenderung tidak stabil.

Hingga tahun 2020 akhir saat ini jumlah pembiayaan bermasalah yang berstatus NPL adalah sebesar 10% dari jumlah harta lancar yaitu sekitar Rp 136.900.000,00. Dalam realitanya belum tercapainya kepuasan pelanggan dalam (internal) disebabkan oleh jumlah pembiayaan bermasalah di BMT Lantahir terhitung dalam kategori tinggi yaitu sekitar 10%. Kategori tersebut melebihi batas NPL yang ditetapkan oleh peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 14/PER/M.KUKM/XI/2016 tentang pedoman penyaluran kredit usaha rakyat, yang mengatakan bahwa batas NPL koperasi adalah sebesar 5% (www.depkop.go.id). Menurut Kamus Bank Indonesia, NPL adalah suatu kredit bermasalah yang

terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan juga macet. NPL atau kredit bermasalah merupakan salah satu parameter utama dalam menilai kinerja fungsi di dalam dunia perbankan dan institusi keuangan lainnya (www.bi.go.id/npl). Hal itu tentu membawa iklim yang buruk bagi BMT Lantansir karena tidak sesuai pula dengan Permenkop No. 07/PER/DEP.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Dan Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Koperasi. Dimana pada aturan tersebut salah satu indikator yang harus dipenuhi adalah dari aspek kualitas aktiva produktif, dimana dalam aspek tersebut terdapat tiga indikator penilaian yaitu rasio tingkat hutang dan pembiayaan bermasalah, rasio portofolio pembiayaan beresiko, dan rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif.

Namun demikian, terdapat pula Lembaga Koperasi Syariah yang memiliki kesamaan dengan BMT Lantansir jika dilihat dari tahun berdirinya yakni sama-sama sudah berdiri selama 12 tahun di Kota Kediri. Koperasi tersebut adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bina Mitra Wahana Ar Rahmah Jawa Timur yang terletak di Jl. Masjid Al Huda No. 127 Kota Kediri. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim memiliki kinerja yang lebih baik dari sisi pembiayaan dibandingkan BMT Lantansir dengan tingkat pembiayaan bermasalah sebesar Rp 81.221.500.00 dengan nilai NPF sebesar 3.20% dari batas toleransi NPF sebesar 5%. Hal itu dibuktikan dengan laporan hasil RAT terakhir pada tahun 2020 yang menunjukkan bahwa perkembangan keuangan KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim cukup stabil dari tahun ke tahun meskipun sedikit mengalami penurunan di tahun 2020 karena pandemi virus covid-19.

Berkembangnya koperasi syariah di Indonesia dapat menjadi salah satu objek penelitian untuk mengetahui kualitas dari koperasi itu sendiri. Untuk melihat perkembangan dan kemampuan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dalam meningkatkan perkembangan ekonomi Indonesia, harus dapat diketahui melalui tingkat kesehatan koperasi syariah itu sendiri. Peraturan mengenai pedoman penilaian kesehatan ini dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Ruang lingkup penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dan unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi ini dilakukan terhadap beberapa aspek, yaitu aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, aspek jati diri koperasi dan aspek kepatuhan prinsip syariah Hasil dari penilaian tersebut akan dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus (Sobarna, 2020).

Untuk mewadahi perkembangan koperasi berbasis simpan pinjam dan pembiayaan syariah, Kemenkop-UKM mengeluarkan Permen nomor 16/Per/M. KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi (KSPPS), sebagai aturan pengganti dari Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/Kep/M.KUKM/- IX/2004 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Hal ini sejalan dengan adanya perkembangan dinamika masyarakat yang mengharuskan kesesuaian pelaksanaan koperasi syariah berdasarkan prinsip syariah yang memiliki ciri, bentuk dan sistem tersendiri. Di dalam Permen nomor 16/Per/M.KUKM/- IX/2015 dijelaskan bahwa sebagai lembaga keuangan syariah, usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi melaksanakan fungsi intermedia yang memiliki ciri, bentuk dan sistem tersendiri harus diatur, diawasi dan dinilai kesehatannya. Penilaian kesehatan perlu dilakukan setiap tahun untuk mengetahui tingkat kesehatan dari segi keuangan, aspek manajemen dan kesesuaian prinsip syariah, Manfaat penilaian

kesehatan bagi internal koperasi dapat mengevaluasi kinerja dan prestasi yang sudah dicapai, dan mengevaluasi apakah koperasi dapat berjalan normal. Di sisi eksternal membangun kepercayaan anggota dan masyarakat sekitar untuk dapat memanfaatkan koperasi syariah sebaik mungkin (Okfitasari dan Suyatno, 2018).

Untuk meningkatkan kualitas dan memecahkan masalah koperasi tersebut, perlu dilakukan pengukuran kinerja sehingga dapat mengevaluasi keberhasilan suatu usaha koperasi. Penilaian kesehatan perlu dilakukan setiap satu tahun sekali untuk melihat tingkat kesehatan dan berdasarkan indikator tertentu (Susanto et al., 2014). Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Kemenkop dan UKM RI No. 07/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) merupakan penelitian paling baru tentang penilaian kesehatan koperasi, selain itu juga dirasakan lebih lengkap dilihat dari aspeknya dan meliputi aspek keuangan dan non keuangan di dalamnya (Adzhani et al., 2020).

Berawal dari permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut kinerja Lembaga keuangan Syariah di BMT Lantansir dan KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim sebagai langkah untuk menemukan solusi dalam rangka mewujudkan Good Corporate Governance (GCG) pada tata kelola manajemen lembaga keuangan Syariah yang bermutu dan berkualitas. Pemilihan KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim sebagai objek perbandingan adalah berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Kediri atas pertimbangan kesamaan waktu pendirian koperasi yaitu minimal sepuluh tahun, perbedaan indeks NPF koperasi yang berada dibawah 5%, termasuk dalam koperasi yang telah melakukan RAT tahun 2020 dan nilai pembiayaan tahun terakhir diatas 1 milyar. Untuk mengetahui pencapaian kualitas dan mutu Lembaga ini dapat dicapai dengan menerapkan metode analisis penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah berdasarkan Permenkop No. 07/PER/DEP.6/IV/2016. Hasil dari analisis tersebut dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam menentukan arah Lembaga keuangan Syariah dalam mencapai kualitas mutu yang baik sehingga mampu meningkatkan daya saing lembaga agar mampu bersaing dengan lembaga lainnya.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Koperasi Syari'ah atau Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) adalah koperasi yang mengkhususkan diri pada usaha jasa keuangan syariah melalui kegiatan maal dan tamwil. Jika koperasi syari'ah sebagai baitul maal berfungsi sebagai lembaga sosial, maka koperasi syari'ah sebagai baitul tamwil berfungsi sebagai lembaga bisnis yang mencari keuntungan dengan konsep bagi hasil. oleh karenanya Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) berdasarkan penelitian dari (Masyithoh, 2014) bisa dikatakan sebagai jenis baru dari jenis-jenis koperasi yang telah ada. belum ada landasan hukum yang memadai bagi beroperasinya Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) di Indonesia, walaupun beberapa Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) mengambil bentuk hukum koperasi, namun hal ini masih bersifat pilihan, dan bukan keharusan.

Baitul Maal Wattamwil (BMT)

BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasionalkan dengan prinsip bagi hasil, Baitul Maal wat Tamwil merupakan lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihanyang menggabungkan konsep maal dan tamwil dalam satu kegiatan lembaga. Konsep maal lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak dan shadaqah (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep tamwil lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah (Darmawan dan Fasa, 2020). BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah, seperti

zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Menurut Yaya, (2009) dalam operasinya, BMT biasanya menggunakan badan hukum koperasi. Oleh karena itu, BMT sering disebut dengan koperasi jasa keuangan syariah. Sedangkan menurut (Ridwan dan Saebani, 2013) Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul maal Wa Tamwil (BMT) adalah usaha balai mandiri terpadu yang kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha kecil, bawah dan menengah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Berdasarkan penelitian (Funna dan Suazhari, 2019) menyebutkan bahwa tujuan utama pengukuran kinerja adalah untuk memberikan motivasi bagi karyawan guna mencapai tujuan perusahaan dan mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan serta hasil yang diinginkan oleh perusahaan. Pengukuran kinerja juga dilakukan untuk menekan perilaku yang tidak semestinya (*disfunctional behaviour*) serta mendorong perilaku yang semestinya diharapkan melalui umpan balik hasil kinerja pada waktunya serta imbalan. Tujuan penilaian kinerja adalah sebagai alat diagnostic dan proses penilai terhadap pengembangan individu, tim dan organisasi. Manajemen kinerja merupakan suatu proses yang dirancang untuk menghubungkan tujuan organisasi dengan tujuan individu, sehingga kedua tujuan tersebut bertemu.

Kinerja juga dapat merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas yang diselesaikan oleh seorang dalam kurun waktu tertentu dan dapat diukur. Kinerja dapat diukur dari segi efisiensi, efektifitas, serta kesehatan organisasi. Sedangkan efektifitas mencakup lebih sempurna dalam mencapai tujuan, lebih tepat dalam mencapai tujuan, lebih mampu beradaptasi terhadap perubahan, lebih meningkatkan kemampuan belajar organisasi (Suprihati, 2014). Menurut Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Dan Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Koperasi, Diperoleh beberapa komponen penilaian diantaranya Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Kemandirian dan Pertumbuhan, Jati Diri Koperasi, dan Kepatuhan Prinsip Syariah.

METODA PENELITIAN

Adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa perbandingan kinerja Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Penelitian ini mengumpulkan data dari BMT Lantahir, KSPPS Ar Rahmah Jatim dan Dinas UMKM Kota Kediri. Sumber data primer diperoleh dari Manager dan para karyawan BMT Lantahir Dan KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim. Data Sekunder diperoleh berupa dokumentasi, yang terdiri dari arsip, dokumentasi dan data-data lainnya seperti profil koperasi dan data lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Ghony, 2014). Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan kredibilitas. Hal ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa apa yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan (Saifudin, 2002). Pengecekan keabsahan data pada penelitian ini dilakukan melalui perpanjangan keikutsertaan, kedalaman pengamatan, dan Triangulasi, yaitu memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data ini untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data itu.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

Tabel 1. Permodalan BMT Lantahir

| Indikator Penilaian | Sub. Indikator | Perhitungan |
|---------------------|--|---|
| Permodalan | Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset. | $\frac{282.948.462}{1.404.272.009} \times 100 = 20\%$ |
| | Rasio Kecukupan Modal (CAR). | $\frac{282.948.462}{2.128.480.927} \times 100 = 13\%$ |

Tabel 2. Permodalan KSPPS Ar Rahmah

| Indikator Penilaian | Sub. Indikator | Perhitungan |
|---------------------|--|--|
| Permodalan | Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset. | $\frac{118.743.805}{1.962.953.567} \times 100 = 6\%$ |
| | Rasio Kecukupan Modal (CAR). | $\frac{118.743.805}{1.664.364.921} \times 100 = 7\%$ |

Berdasarkan hasil analisis kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa Aspek pertama penilaian kesehatan KSPPS/USPPS Koperasi adalah permodalan. Penilaiannya dilakukan dengan menggunakan dua rasio permodalan yaitu perbandingan modal sendiri dengan total aset dan rasio kecukupan modal (CAR). Rasio modal sendiri terhadap total aset dimaksudkan untuk mengukur kemampuan KSPPS/USPPS Koperasi dalam menghimpun modal sendiri dibandingkan dengan aset yang dimiliki. Pada KSPPS/USPPS Koperasi rasio ini dianggap sehat apabila nilainya maksimal 20%. Artinya bahwa KSPPS/USPPS Koperasi telah mampu menumbuhkan kepercayaan anggotanya, untuk menyimpan dana pada KSPPS/USPPS Koperasi. Modal kerja didefinisikan sebagai modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari, terutama yang memiliki jangka waktu pendek. Rasio keuangan adalah suatu hal yang menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara jumlah tertentu dengan jumlah yang lain atau perbandingan antara berbagai gejala yang dinyatakan dengan angka/persentase. Berbeda dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor: 129/KEP/M.KUKM/XI/2002 dapat ditentukan dengan membagi antara SHU setelah pajak dengan modal sendiri.

Rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada lembaga keuangan seperti KSPPS/USPPS Koperasi merupakan kewajiban penyediaan kecukupan modal (modal minimum) didasarkan pada risiko aktiva yang dimilikinya. Penggunaan rasio ini dimaksudkan agar para pengelola KSPPS/USPPS Koperasi melakukan pengembangan usaha yang sehat dan dapat menanggung risiko kerugian dalam batas-batas tertentu yang dapat diantisipasi oleh modal yang ada. Menurut surat Edaran Bank Indonesia yang berlaku saat ini sebuah lembaga keuangan dikatakan sehat apabila nilai CAR mencapai 8% atau lebih. Artinya Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dijamin oleh modal sendiri (modal inti) dan modal lain yang memiliki karakteristik sama dengan modal sendiri (modal pelengkap) sebesar 8%. Untuk nilai CAR lebih tinggi dari 8%, menunjukkan indikasi bahwa KSPPS/USPPS Koperasi semakin sehat.

Kualitas Aktiva Produktif

Tabel 3. Permodalan BMT Lantahir

| | | |
|---------------------------|--|---|
| Kualitas Aktiva Produktif | Rasio Tingkat Pembiayaan Dan Piutang Bermasalah. | $\frac{136.900.000}{1.371.216.000} \times 100 = 9,98\%$ |
| | Rasio Portofolio Pembiayaan Beresiko. | $\frac{34.732.950}{1.371.216.000} \times 100 = 2,5\%$ |

Tabel 4. Permodalan KSPPS AR Rahmah

| | | |
|---------------------------|--|--|
| Kualitas Aktiva Produktif | Rasio Tingkat Pembiayaan Dan Piutang Bermasalah. | $\frac{81.221.500}{1.501.901.400} \times 100 = 5,4\%$ |
| | Rasio Portofolio Pembiayaan Beresiko. | $\frac{113.216.500}{1.501.901.400} \times 100 = 2,5\%$ |

Komponen dalam penelitian faktor Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dalam ketentuan lama, yaitu perbandingan antara jumlah PPAP terhadap jumlah Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan (APYD), dalam ketentuan baru yang digantikan dengan komponen jumlah PPAP yang telah dibentuk terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Wajib Dibentuk (PPWD).

Manajemen

Tabel 5. Penilaian Aspek Manajemen BMT Lantahir

| | | |
|-----------|-----------------------|------|
| Manajemen | Manajemen Umum | 3,00 |
| | Manajemen Kelembagaan | 3,00 |
| | Manajemen Permodalan | 1,80 |
| | Manajemen Aktiva | 3,00 |
| | Manajemen Likuiditas | 3,00 |

Tabel 6. Penilaian Aspek Manajemen KSPPS AR RAHMAH

| | | |
|-----------|-----------------------|------|
| Manajemen | Manajemen Umum | 3.00 |
| | Manajemen Kelembagaan | 3.00 |
| | Manajemen Permodalan | 1.20 |
| | Manajemen Aktiva | 3.00 |
| | Manajemen Likuiditas | 3.00 |

Koperasi memiliki ciri ganda, yaitu merupakan organisasi ekonomi yang berwatak sosial, yang berarti koperasi yang mengandung unsur-unsur sosial di dalamnya. Dengan demikian dapat dipahami bagaimana beratnya tugas dan tanggung jawab dari manajemen terhadap keberhasilan pengelolaan koperasi dan usahanya karena manajemen harus bekerja dengan mendasarkan pada prinsip ekonomi dan prinsip koperasi yang mengandung unsur-unsur sosial di dalamnya. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu, jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.

Efisiensi

Tabel 7. Penilaian Aspek Efisiensi BMT Lantahir

| | | |
|-----------|--|---|
| Efisiensi | Rasio Biaya Operasional Pelayanan Terhadap Partisipasi Bruto | $\frac{323.604.818}{308.831.000} \times 100 = 105\%$ |
| | Rasio Aktiva Tetap Terhadap Total Aset | $\frac{6.137.485}{1.404.272.009} \times 100 = 0,44\%$ |
| | Rasio Efisiensi Pelayanan | $\frac{199.965.000}{1.371.216.000} \times 100 = 14,5\%$ |

Tabel 8. Penilaian Aspek Efisiensi KSPPS AR Rahmah

| | | |
|-----------|--|---|
| Efisiensi | Rasio Biaya Operasional Pelayanan Terhadap Partisipasi Bruto | $\frac{164.638.062}{192.669.396} \times 100 = 85\%$ |
| | Rasio Aktiva Tetap Terhadap Total Aset | $\frac{6.137.485}{1.962.953.568} \times 100 = 0,34\%$ |
| | Rasio Efisiensi Pelayanan | $\frac{86.056.500}{1.501.901.400} \times 100 = 5,7\%$ |

Efisiensi merupakan perbandingan output dan input berhubungan dengan tercapainya output maksimum dengan sejumlah input, hal ini mengimplikasikan jika rasio output-input besar, maka efisiensi dikatakan semakin tinggi. Konsep efisiensi terdiri dari beberapa pengertian, yaitu efisiensi teknis, efisiensi harga, dan efisiensi ekonomi. Efisiensi teknis adalah perbandingan antara produksi aktual dengan tingkat produksi potensial yang dapat dicapai. Efisiensi alokatif mengukur kemampuan perusahaan untuk menggunakan input dengan proporsi yang optimal pada masing-masing tingkat harga input dan teknologi yang dimiliki. Efisiensi ekonomi adalah besaran yang menunjukkan perbandingan antara keuntungan yang sebenarnya dengan keuntungan maksimum (Aumora et al., 2016).

Penilaian efisiensi koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio yaitu rasio biaya operasional terhadap pelayanan, rasio aktiva tetap terhadap total aset dan rasio efisiensi pelayanan. Rasio - rasio di atas menggambarkan sampai seberapa koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan asset yang dimilikinya. Rentabilitas koperasi hanya untuk mengukur keberhasilan perusahaan koperasi yang diperoleh dari penghematan biaya pelayanan (Okfitasari dan Suyatno, 2018). Dalam pelaksanaan pekerjaan sering dijumpai kendala-kendala yang dapat mempengaruhi kelancaran kerja. Diantaranya dapat berupa sistem, prosedur atau cara kerja yang kurang efisien dalam melaksanakan pekerjaan. Efisiensi seringkali dikaitkan dengan kinerja satu organisasi karena efisiensi mencerminkan perbandingan antara keluaran (output) dengan masukan (input). Dalam berbagai literatur, efisiensi juga sering dikaitkan dengan produktivitas karena sama-sama menilai variabel input terhadap output (Syarifuddin, 2016).

Likuiditas

Tabel 9. Penilaian Aspek Likuiditas BMT Lantasir

| | | |
|------------|--|---|
| Likuiditas | Cash Rasio | $\frac{26.918.524}{787.641.520} \times 100 = 3,41\%$ |
| | Rasio Pembiayaan Terhadap Dana Yang Diterima | $\frac{1.371.216.000}{730.826.80} \times 100 = 187\%$ |

Tabel 10. Penilaian Aspek Likuiditas KSPPS AR Rahmah

| | | |
|------------|--|---|
| Likuiditas | Cash Rasio | $\frac{772.422.876}{1.807.892.000} \times 100 = 42,72\%$ |
| | Rasio Pembiayaan Terhadap Dana Yang Diterima | $\frac{1.501.901.400}{1.887.182.264} \times 100 = 79,5\%$ |

Likuiditas adalah kemampuan KSPPS Koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kewajiban yang dimiliki oleh KSPPS Koperasi berasal dari simpanan para nasabah, di antaranya simpanan wadiah, simpanan mudharabah, simpanan mudharabah berjangka, hutang salam, hutang istishna, pembiayaan yang diterima dari lembaga keuangan syariah dan kewajiban lainnya. Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSPPS/USPPS Koperasi dilakukan terhadap 2 (dua) rasio, yaitu Rasio kas dan Rasio pembiayaan.

Likuiditas adalah salah satu faktor yang menentukan sukses atau gagalnya suatu perusahaan penyediaan kebutuhan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek (Putri et al., 2020). Dalam praktiknya nilai jumlah Kas dan simpanan di bank tidak seimbang dengan total kewajiban lancar sehingga BMT Lantasir mendapatkan predikat tidak likuid. Kas dan bank adalah alat likuid yang segera dapat digunakan, seperti uang tunai dan uang yang tersimpan lembaga keuangan syariah lain (Sobarna, 2020).

Jati Diri Koperasi

Tabel 11. Penilaian Aspek Jati Diri Koperasi BMT Lantansir

| | | |
|--------------------|-------------------------------------|---|
| Jati diri Koperasi | Rasio Partisipasi Bruto | $\frac{308.831.000}{1.056.472.520} \times 100 = 29\%$ |
| | Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) | $\frac{28.895.391}{170.520.000} \times 100 = 17\%$ |

Tabel 12. Penilaian Aspek Jati Diri Koperasi KSPPS AR Rahmah

| | | |
|--------------------|-------------------------------------|--|
| Jati diri Koperasi | Rasio Partisipasi Bruto | $\frac{28.031.334}{34.500.444} \times 100 = 81\%$ |
| | Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) | $\frac{48.134.165}{151.762.000} \times 100 = 32\%$ |

Dengan lahirnya koperasi yang berkembang di Indonesia yaitu dalam rangka untuk mengaktualisasikan kelembagaan masyarakat yang memiliki jiwa "gotong royong", untuk menggerakkan pembangunan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Berbagai peraturan yang mengatur koperasi dibuat untuk mempercepat sosialisasi koperasi sekaligus untuk memberikan arah bagi pengembangan koperasi, sehingga koperasi mampu bersaing dan dapat mampu memperkuat perekonomian nasional (Darmawanto, 2015).

Koperasi mempunyai tujuan untuk memajukan kesejahteraan peserta koperasi pada khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya, serta ikut ambil bagian dalam membangun tatanan perekonomian nasional demi terwujudnya masyarakat yang maju, adil, makmur serta demokratis yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mencapai tujuan koperasi diperlukan prinsip-prinsip koperasi. Prinsip bagi organisasi perkoperasian merupakan pedoman yang mendukung keberhasilan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Selain itu, merupakan pembeda antara koperasi dengan badan usaha lainnya (Murtiningsih et al., 2019).

Kemandirian dan Pertumbuhan

Tabel 13. Penilaian Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan BMT Lantansir

| | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| Kemandirian Dan Pertumbuhan | Rentabilitas Aset | $\frac{14.773.818}{1.404.272.009} \times 100 = 1,05\%$ |
| | Rentabilitas Ekuitas | $\frac{4.895.391}{616.630.489} \times 100 = 0,79\%$ |
| | Kemandirian Operasional Pelayanan | $\frac{308.831.000}{323.604.818} \times 100 = 95\%$ |

Tabel 14. Penilaian Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan KSPPS Ar Rahmah

| | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| Kemandirian Dan Pertumbuhan | Rentabilitas Aset | $\frac{29.031.000}{1.962.953.568} \times 100 = 1,48\%$ |
| | Rentabilitas Ekuitas | $\frac{7.943.800}{210.321.805} \times 100 = 3,8\%$ |
| | Kemandirian Operasional Pelayanan | $\frac{192.669.396}{164.638.062} \times 100 = 117\%$ |

Istilah "kemandirian" berasal dari kata dasar "diri" yang mendapat awalan "ke" dan akhiran "an", kemudian membentuk satu kata keadaan atau kata benda. Karena kemandirian berasal dari kata "diri", maka pembahasan mengenai kemandirian tidak bisa lepas dari pembahasan tentang perkembangan diri itu sendiri, yang dalam konsep Carl Rogers di sebut dengan istilah self, karena diri itu merupakan inti dari kemandirian (Desmita, 2015). Perspektif keempat dalam Balanced Scorecard mengembangkan pengukuran dan tujuan untuk mendorong organisasi agar berjalan dan tumbuh. Tujuan dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan adalah menyediakan infrastruktur untuk mendukung pencapaian tiga perspektif sebelumnya. Yaitu

tentang Perspektif Keuangan, Perspektif Pelanggan, dan Perspektif Proses Bisnis Internal (Astawa et al., 2020).

Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah

Penilaian aspek kepatuhan prinsip syariah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana prinsip syariah diterapkan/dipatuhi oleh KSPPS/USPPS Koperasi dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai lembaga keuangan syariah. Penilaian kepatuhan prinsip syariah dilakukan dengan perhitungan nilai kredit yang didasarkan pada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan sebanyak 10 (sepuluh) buah (pertanyaan terlampir) dengan bobot 10%, berarti untuk setiap jawaban positif 1 (satu) memperoleh nilai kredit bobot 1 (satu). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, hasil penilaian kepatuhan prinsip Syariah dari masing – masing lembaga mendapat hasil patuh karena telah memenuhi seluruh kriteria kepatuhan prinsip Syariah. Dan berhak mendapatkan predikat ; **Patuh**.

Pembahasan

Permodalan

Tabel 15. Perbandingan Aspek Permodalan

| No. | Komponen | Skor Lembaga | |
|-----|--|--------------|-----------------|
| | | BMT Lantasir | KSPPS Ar Rahmah |
| 1. | Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Modal | 5,00 | 1,25 |
| 2. | Rasio Kecukupan Modal (CAR) | 5,00 | 3,75 |

Berdasarkan penilaian aspek permodalan diatas, dapat diketahui bahwa BMT Lantasir memiliki rasio permodalan yang lebih baik dibanding KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim, dengan perolehan skor 5.00 (maksimal 5,00) dari keseluruhan komponen penilaian aspek permodalan. Dan berhak mendapatkan predikat; **Sehat**. Sedangkan KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim memperoleh skor 1,25 pada rasio modal sendiri terhadap total modal sehingga berhak mendapat predikat; **Tidak Sehat**. dan nilai 3,75 pada Rasio Kecukupan Modal (CAR). Dan berhak mendapatkan predikat; **Cukup Sehat**. Perolehan nilai maksimal yang didapat oleh BMT Lantasir tersebut dikarenakan nilai modal sendiri yang dimiliki lebih besar daripada total aset. Sedangkan nilai modal sendiri KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim lebih kecil daripada nilai total aset yang dimiliki. Kualitas aktiva produksi adalah earnings asset quality yaitu tolok ukur untuk menilai tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam aktiva produksi. Untuk rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan, dan untuk rasio pembiayaan portofolio berisiko, semakin kecil angka rasionya menunjukkan bahwa kinerja keuangan koperasi semakin lancar, namun untuk rasio PPAP semakin besar angka rasio justru menunjukkan koperasi semakin lancar.

Kualitas Aktiva Produktif

Tabel 16. Perbandingan Kinerja Aspek Kualitas Aktiva Produktif

| No. | Komponen | Skor Lembaga | |
|-----|--|--------------|-----------------|
| | | BMT Lantasir | KSPPS Ar Rahmah |
| 1. | Rasio Tingkat Pembiayaan Dan Piutang Bermasalah Terhadap Jumlah Piutang Dan Pembiayaan | 5.00 | 7.50 |
| 2. | Rasio Portofolio Pembiayaan Berisiko | 5.00 | 5.00 |
| 3. | Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif | 2.00 | 1.50 |

Berdasarkan hasil penelitian aspek kualitas aktiva produktif dari BMT Lantasis dan KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim diatas, dapat dilihat bahwa Rasio Tingkat Pembiayaan Dan Piutang Bermasalah Terhadap Jumlah Piutang Dan Pembiayaan KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim lebih baik dibandingkan BMT Lantasis dengan perolehan nilai skor sebesar 7,50 (maksimal 10,00). Dan berhak mendapatkan predikat ; **Cukup Lancar**. Nilai tersebut diperoleh karena nilai NPF di KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim lebih rendah daripada BMT Lantasis yaitu sebesar 3,20%. Sedangkan BMT Lantasis memperoleh nilai lebih rendah yaitu 5,00 dikarenakan NPF nya mencapai 10%. Pada Rasio Portofolio Pembiayaan Beresiko, kedua lembaga memiliki nilai yang sama yaitu 5,00. Dan berhak mendapatkan predikat ; **Tidak Beresiko**. Pada Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif BMT Lantasis memiliki nilai lebih tinggi sebesar 2,00 dikarenakan pendapatan usaha dari sektor pembiayaan mengalami penurunan sehingga Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktifnya lebih tinggi untuk menutupi biaya operasionalnya. Sedangkan KSPPS Ar Rahmah Jatim mendapat nilai 1,50. Meski BMT Lantasis mendapat nilai lebih tinggi namun dalam Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, namun nilainya berada dalam range yang sama sehingga kedua lembaga berhak mendapatkan predikat ; **Diragukan**.

Aspek Manajemen

Tabel 17. Perbandingan Skor Aspek Manajemen

| No. | Komponen | Skor Lembaga | |
|-----|----------------------|--------------|-----------------|
| | | BMT Lantasis | KSPPSvAr Rahmah |
| 1. | Manajemen umum | 3.00 | 3.00 |
| 2. | Kelembagaan | 3.00 | 3.00 |
| 3. | Manajemen permodalan | 1.80 | 1.20 |
| 4. | Manajemen aktiva | 3.00 | 3.00 |
| 5. | Manajemen likuiditas | 3.00 | 3.00 |

Secara keseluruhan, hasil penilaian aspek manajemen dari BMT Lantasis dan KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim memiliki skor yang hampir sama hampir diseluruh komponen manajemen yaitu mendapat nilai 3,00 (maksimal 3,00). Sehingga berhak mendapatkan predikat ; **Baik**. dan hanya terdapat perbedaan nilai yaitu dalam aspek manajemen permodalan. Dimana dalam aspek tersebut, BMT Lantasis sedikit lebih unggul dari KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim dengan mendapat skor 1,80 (maksimal 3,00). Dan berhak mendapatkan predikat ; **Cukup Baik**.

Hasil Penilaian Aspek Efisiensi

Tabel 18. Perbandingan Skor Aspek Efisiensi

| No. | Komponen | Skor Lembaga | |
|-----|--|--------------|-----------------|
| | | BMT Lantasis | KSPPS Ar Rahmah |
| 1. | Biaya Operasional Terhadap Partisipasi Bruto | 1.00 | 3.00 |
| 2. | Rasio Aktiva Tetap Terhadap Total Aset | 4.00 | 4.00 |
| 3. | Rasio Efisiensi Pelayanan | 0.50 | 0.50 |

Berdasarkan hasil analisis kinerja aspek efisiensi dari masing – masing lembaga diatas dapat diketahui bahwa perbedaan hanya terdapat pada aspek komponen Biaya Operasional Terhadap Partisipasi Bruto. Dimana dalam aspek tersebut KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim memiliki nilai yang lebih baik daripada BMT Lantasis. Dengan perolehan nilai skor sebesar 3,00 (maksimal 4). Dan berhak mendapatkan predikat ; **Cukup Efisien**. Sedangkan BMT Lantasis hanya mendapat nilai 1,00. Dan berhak mendapat predikat ; **Tidak Efisien**. Keunggulan nilai yang didapat oleh KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim tersebut dikarenakan biaya operasionalnya lebih rendah terhadap partisipasi brutonya. Sedangkan dalam aspek komponen lainnya yaitu Rasio

Aktiva Tetap Terhadap Total Aset masing – masing lembaga memiliki skor nilai sama yaitu 4,00 dan berhak mendapatkan predikat ; **Baik**. dan dalam aspek Rasio Efisiensi Pelayanan keduanya mendapat nilai 0,50 dan berhak mendapatkan predikat; **Tidak Baik**.

Hasil Penilaian Aspek Likuiditas.

Tabel 19. Perbandingan Skor Aspek Likuiditas

| No. | Komponen | Skor Lembaga | |
|-----|--|--------------|-----------------|
| | | BMT Lantahir | KSPPS Ar Rahmah |
| 1. | Cash Rasio | 2.50 | 7.50 |
| 2. | Rasio Pembiayaan Terhadap Dana Yang Diterima | 5.00 | 3.75 |

Berdasarkan hasil analisis aspek likuiditas diatas, dapat disimpulkan bahwa Cash Rasio yang dimiliki KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim memiliki skor yang lebih tinggi Dari BMT Lantahir yaitu senilai 7,50 (maksimal 10,00). Dan berhak mendapatkan predikat ; **Cukup Likuid**. Skor tersebut diperoleh dari nilai kas dan tabungan di bank lain lebih besar dari BMT Lantahir termasuk jumlah kewajiban lancarnya. Dalam hal ini BMT Lantahir mendapatkan nilai lebih rendah yaitu 2,50 (maksimal 10,00) dan berhak mendapatkan predikat ; **Tidak Likuid**. Nilai tersebut diperoleh dari jumlah nilai kas dan tabungan di bank lain lebih kecil dari total kewajiban lancar. Sedangkan dalam aspek komponen Rasio Pembiayaan Terhadap Dana Yang Diterima, BMT Lantahir memiliki skor yang lebih baik yaitu 5,00 (maksimal 5,00) dan berhak mendapatkan predikat ; **Likuid**.

Hasil Penilaian Aspek Jati Diri Koperasi

Tabel 20. Perbandingan Skor Aspek Jati Diri Koperasi

| No. | Komponen | Skor Lembaga | |
|-----|---|--------------|-----------------|
| | | BMT Lantahir | KSPPS Ar Rahmah |
| 1 | Rasio Parsipasi Bruto | 2.50 | 5.00 |
| 2 | Rasio Partisipasi Ekonomi Anggota (PEA) | 5.00 | 5,00 |

Berdasarkan hasil analisis perbandingan aspek jati diri koperasi diatas dapat diketahui bahwa perolehan skor dalam komponen Rasio Parsipasi Bruto KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim lebih tinggi daripada BMT Lantahir dengan mendapat nilai 5,00 (maksimal 5,00) dan mendapat predikat ; **Bermanfaat**. Nilai tersebut diperoleh dari rasio partisipasi bruto yang lebih tinggi presentasinya. Sedangkan BMT Lantahir mendapat nilai lebih rendah yaitu 2,50 dan mendapat predikat ; **Kurang Bermanfaat**. Pada Rasio Partisipasi Ekonomi Anggota (PEA) kedua lembaga sama – sama mendapatkan skor 5,00 dan berhak mendapatkan predikat ; **Bermanfaat**.

Kemandirian dan Pertumbuhan.

Tabel 21. Perbandingan Skor Aspek Kemandirian Dan Pertumbuhan

| No. | Komponen | Skor Lembaga | |
|-----|---|--------------|-----------------|
| | | BMT Lantahir | KSPPS Ar Rahmah |
| 1 | Rasio Rentabilitas Aset | 0.75 | 0.75 |
| 2 | Rasio Rentabilitas Modal Sendiri | 0.75 | 0.75 |
| 3 | Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan | 1.00 | 4.00 |

Berdasarkan hasil penilaian aspek kemandirian dan pertumbuhan diatas, dapat diketahui bahwa secara umum perolehan skor komponen Rasio Rentabilitas Aset dan Rasio Rentabilitas Modal Sendiri dari masing – masing lembaga adalah sama. Dan berhak mendapat predikat ; **Rendah**. Namun terdapat perbedaan pada komponen Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan,

dimana KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim mendapat skor lebih tinggi yaitu 4,00 (maksimal 4,00) dan berhak mendapat predikat ; **Tinggi**. Nilai tersebut diperoleh dari jumlah pendapatan usaha dan yang lebih besar dari namun biaya operasionalnya lebih rendah dari BMT Lantahir.

Hasil Perbandingan Kesehatan.

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 8 (delapan) komponen sebagaimana dimaksud pada angka 1-8 diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSPPS/USPPS Koperasi yang dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus. Penetapan predikat kesehatan serupa secara parsial berdasarkan komponen juga dapat dilihat pada masing-masing penilaian komponen yang sudah dijelaskan di atas. Penetapan predikat tingkat kesehatan KSPPS/USPPS Koperasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 22. Predikat Tingkat Kesehatan Koperasi

| Skor | Predikat |
|---------------------|-------------------------|
| $80,00 < X < 100$ | Sehat |
| $66,00 < X < 80,00$ | Cukup Sehat |
| $51,00 < X < 66,00$ | Dalam Pengawasan |
| $0 < X < 51,00$ | Dalam Pengawasan Khusus |

Sumber : Permenkop. No. 07/PER/DEP.6/IV/2016.

Dari pembagian kriteria skor diatas, maka berdasarkan hasil analisis kesehatan koperasi Syariah BMT Lantahir dan KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim berhak mendapatkan predikat sebagai berikut :

Tabel 23. Skor Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi

| Nama Lembaga | Skor | Predikat |
|---------------------|-------|-------------|
| BMT Lantahir | 68,80 | Cukup Sehat |
| KSPPS BMW Ar Rahmah | 75,95 | Cukup Sehat |

Hasil dari penilaian kinerja antara BMT Lantahir dan KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim diatas menunjukkan bahwa skor yang didapat oleh KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim lebih tinggi dibandingkan dengan BMT Lantahir. Perolehan skor tersebut diperoleh dari NPF yang lebih rendah dan jumlah penyaluran pembiayaan lebih tinggi dibanding BMT Lantahir. Faktor lain yang mempengaruhi adalah jumlah anggota KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim lebih banyak yang aktif daripada BMT Lantahir. Jumlah total aktiva produktif BMT Lantahir lebih kecil dari KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim yaitu senilai Rp 1.398.134.524,00 karena nilai pembiayaan yang disalurkan KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim lebih besar lebih besar 26,31% dari total aktiva produktif BMT Lantahir yaitu senilai Rp 1.897.385.184,00. Nilai keseluruhan total aset KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim lebih tinggi daripada aset BMT Lantahir yaitu senilai Rp 1.962.953.567,00 karena sebagian besar peralatan inventaris koperasi merupakan milik bersama sehingga tidak perlu membayar sewa tiap tahunnya.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Dari apa yang telah dijabarkan pada pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Kinerja BMT Lantahir Dalam Kurun Waktu 2018 – 2020. Berdasarkan analisis kesehatan sebuah koperasi syariah menggunakan aturan Permenkop No. 07/Per/Dep.6/IV/2016 BMT Lantahir mendapatkan skor 68,80 dan berhak mendapatkan predikat ; Cukup Sehat. Hasil tersebut didapatkan dari pengolahan ke delapan indikator yang telah ditetapkan oleh Permenkop. Dari sejumlah data yang telah diolah, secara keseluruhan pendapatan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 65,92%. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan usaha BMT Lantahir yaitu berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal

berasal dari dalam BMT Lantansir sendiri seperti terbatasnya jumlah SDM yang memenuhi kriteria operasional dan lemahnya pengawasan dari pihak terkait. Faktor eksternal lainnya yang menyebabkan tingginya NPF di BMT Lantansir adalah kegagalan anggota dalam membayar kewajibannya yang disebabkan beberapa faktor. Seperti kondisi alam yang dilanda virus covid 19 dan kegagalan usaha yang disebabkan faktor lingkungan.

Kinerja KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim Dalam Kurun Waktu 2018 – 2020. Berdasarkan analisis kesehatan sebuah koperasi syariah menggunakan aturan Permenkop No. 07/Per/Dep.6/IV/2016 KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim berhak mendapatkan predikat ; Cukup Sehat. dengan perolehan hasil penilaian kesehatan koperasi sebesar 75,95. Hasil tersebut diperoleh dari beberapa aspek indikator yang menyumbang nilai paling tinggi dalam menunjang perolehan nilai tersebut diantaranya adalah dalam aspek indikator Kualitas Aktiva Produktif dan aspek likuiditas Cash Rasio. Kedua indikator penilaian tersebut menjadi kelebihan bagi KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim.

Perbandingan Kinerja BMT Lantansir Dan KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim Selama 2018 – 2020. Hasil perbandingan dari penilaian kedua lembaga dapat diketahui bahwa kinerja KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan BMT Lantansir dari total perolehan skor. Dimana KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim mendapatkan skor 75,95 dan BMT Lantansir mendapatkan skor 68,80. Terdapat selisih 7,15 dari KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim. Meskipun jumlah nasabah BMT Lantansir lebih banyak dibandingkan KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim ternyata dalam hal penyaluran dananya, KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim lebih unggul nilainya dimana jumlah pembiayaan KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim 8,70% lebih besar dibandingkan BMT Lantansir dan jumlah angka NPF hanya sebesar 3,20%. Keunggulan dalam hal penyaluran pembiayaan ini membuat nilai kinerja KSPPS BMW Ar Rahmah lebih unggul dari BMT Lantansir terutama dalam aspek permodalan. Namun bukan berarti BMT Lantansir tidak memiliki kelebihan, dalam aspek penerimaan dana pihak ketiga, BMT Lantansir jauh lebih unggul dibandingkan KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada setiap pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama penyusunan sehingga artikel ini dapat diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adzhani, H. Y.; Ichsan, N.; Cahyadi, A. (2020). Analisis Kinerja Koperasi Syariah Berdasarkan Peraturan Nomor: 07/PER/DEP.6/IV/2016 (Studi Pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Periode 2015-2019). *ASSETS: Jurnal Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi*. 10(2). 220-230. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/assets/article/view/18604>
- Astawa, I.G.P.B, Julianto, I. P, Dewi, L. G. K. (2020). Penilaian Kinerja Koperasi Unit Desa (KUD) Penebel Tabanan Dengan Pendekatan Balanced Scorecard. *Jurnal MONEX*. 9(1). 18-29. <https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/monex/article/view/1433>
- Aumora, N. S., Bakce, D., Dewi, N. (2016). Analisis Efisiensi Produksi Usahatani Kelapa di Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal SOROT*. 11(1). 47-59. <https://sorot.ejournal.unri.ac.id/index.php/JS/article/view/3870>
- Darmawan dan Fasa, M. I. (2020). *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UNY Press.
- Darmawanto, A. T.; Maryunani; Noor, Iswan. (2015). Pengukuran Jatidiri dan Daya Saing Koperasi dengan Pendekatan Development Ladder Assesment (DLA) Studi pada KUD Subur, KPRI Universitas Brawijaya, dan KWSU BAM di Kota. *Jurnal Aplikasi Manajemen (JAM)*. 13(4). 610-619. <https://jurnaljam.ub.ac.id/index.php/jam/article/view/811>
- Desmita. (2014). *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Funna, H. S. R. dan Suazhari. (2019). Analisis Pengukuran Kinerja Koperasi Syariah Berdasarkan Balanced Scorecard (Studi Pada Koperasi Syariah Baiturrahman Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. 4(3). 532-546.
- Ghony, M. D. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
<https://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-35653884/koperasi-atau-bmt-bisa-dapat-dana-bergulir-hingga-rp-100-miliar-dari-lpdb?page=2#>. Diakses 6 November 2020.
- Masyithoh, N. D. (2014). Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *ECONOMICA*. 5(2). 17-36.
- Murtiningsih, Sumarni, I., Wirawan, S. (2019). Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Dilihat Dari Aspek Permodalan, Manajemen, Likuiditas, Kemandirian Dan Pertumbuhan Koperasi (Studi pada KSU Sungai Kihung Lestari Tahun 2017). *JAPB*. 2(1).
<https://123dok.com/document/q7x3j6ny-murtiningsih-indriati-sumarni-septiadi-wirawan.html>
- Nuryadin, H. (2004). *BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Okfitasari, A. dan Suyatno, A. (2018). Analisis Kesehatan Koperasi Syariah dalam Upaya Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 4(02). 103-115.
- Putri, N. D. dan Yuniningsih dan Wikartika, I. (2020). Analisis Nilai Kecukupan Modal Pada Bank Konvensional Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*. 2(1). DOI: <https://doi.org/10.30812/target.v2i1.690>
- Ridwan, Ahmad Hasan dan Saebani, Beni Ahmad. (2013). *Manajemen Baitul Mal Watamwil*. Bandung: Pustaka Setia.
- Saifudin. (2002). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Setia
- Sobarna, N. (2020). Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Al Uswah Indonesia Kota Banjar. *Jurnal Ilmiah Manajemen*. 11(3). DOI: <https://doi.org/10.32670/coopetition.v11i3.153>
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Supadie, D. A. (2013). *Sistem lembaga keuangan ekonomi syariah dalam pemberdayaan ekonomi rakyat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Suprihati. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan Perusahaan Sari Jati di Sragen. *Jurnal Paradigma*. 12(01). 93-112.
<https://media.neliti.com/media/publications/115677-ID-analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi.pdf>
- Susanto, Sarwani, Afandi, S. (2014). Analisis Kinerja Keuangan untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan dan Prospek Usaha (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang). *INOVASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*. 1(1). 1-15.
- Syaifuddin. (2016). Analisis Fakto–Faktor yang Mempengaruhi Efisiensi Kerja Karyawan PT. Metro Fajar Berlian. *SULTANIST: Jurnal Manajemen dan Keuangan*. 4(2). 23-31. DOI: <https://doi.org/10.37403/sultanist.v4i2.73>
- www.bi.go.id/npl. Diakses 13 November 2020
- www.depkop.go.id. Diakses 13 November 2020
- Yaya, R. (2009). *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat).